

**PERAN MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM
MENCEGAH RADIKALISME NON-KEKERASAN DI KALANGAN PELAJAR KELAS
VIII**

Santa Theresia Br Sipayung¹, Monalisa Marta Siahaan², Rince Marpaung³

Email : santatheresiasipayung@gmail.com

^{1,2,3} Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan,
Universitas HKBP Nommensen, Medan, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam mencegah radikalisme di lingkungan sekolah serta mengeksplorasi strategi pembelajaran yang efektif dalam membentuk sikap toleran dan nasionalisme di kalangan siswa. Dengan meningkatnya ancaman radikalisme di berbagai lapisan masyarakat, pendidikan menjadi salah satu instrumen utama dalam membangun ketahanan ideologi generasi muda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus di beberapa sekolah menengah atas. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan guru dan siswa, observasi proses pembelajaran, serta analisis dokumen kurikulum dan bahan ajar. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk memahami efektivitas materi dan metode pembelajaran yang digunakan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan serta menangkal pengaruh ideologi radikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran signifikan dalam membentuk pemahaman siswa tentang bahaya radikalisme serta pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman. Guru yang menerapkan metode pembelajaran berbasis diskusi, studi kasus, dan simulasi menemukan bahwa siswa lebih aktif dalam berpikir kritis dan memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai toleransi serta nilai-nilai Pancasila. Namun, tantangan dalam implementasi masih ditemukan, seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya pelatihan bagi pendidik dalam mengajarkan isu-isu radikalisme secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi guru dan penguatan kurikulum yang lebih kontekstual agar Pendidikan Kewarganegaraan dapat berkontribusi lebih optimal dalam mencegah penyebaran paham radikal di lingkungan sekolah. Kata Kunci : Pendidikan Kewarganegaraan, Radikalisme

Abstrak

This study aims to analyze the role of Civic Education in preventing radicalism in schools and to explore effective teaching strategies in fostering students' tolerance and nationalism. With the increasing threat of radicalism across various social levels, education has become one of the primary instruments in building the ideological resilience of the younger generation. This research employs a qualitative method with a case study approach in several high schools. Data were collected through interviews with teachers and students, classroom observations, and an analysis of curriculum documents and teaching materials. The collected data were analyzed descriptively to understand the effectiveness of instructional materials and teaching methods in instilling national values and countering radical ideologies. The findings indicate that Civic Education plays a significant role in shaping students' understanding of the dangers of radicalism and the importance of maintaining unity in diversity. Teachers who implemented discussion-based learning, case studies, and simulations observed that students became more engaged in critical thinking and developed a stronger comprehension of tolerance and Pancasila values. However, challenges in implementation remain, such as limited resources and a lack of training for educators in effectively addressing radicalism-related issues. Therefore, enhancing teachers' competencies and strengthening a more contextually relevant curriculum are necessary for Civic Education to contribute more effectively to radicalism prevention in schools.

Keywords: Civic Education, Radicalism

Info Artikel : Diterima April 2025 | Disetujui April 2025 | Dipublikasikan Mei 2025

PENDAHULUAN

Eksistensi dan keberlangsungan hidup manusia sangat bergantung pada proses pendidikan, dimana pendidikan dapat dianggap sebagai tolak ukur tingkat peradapan suatu negara. Semua pihak prihatin karena keberagaman dan perdamaian terancam oleh praktiknya. Salah satunya adalah radikalisme, yang bahkan tumbuh subur di institusi pendidikan karena adanya komponen yang secara tidak sengaja telah mendarah daging dalam budaya sekolah (Putra & Rulloh, 2023).

Kata “radix,” yang berarti “akar,” adalah asal dari kata “radikalisme.” Oleh karena, mentalitas seseorang yang ingin mengubah sesuatu dengan menghancurkan yang ada saat ini dan menggantinya dengan yang sebelumnya dapat diartikan sebagai radikalisme. Pendekatannya biasanya berupa kekerasan yang parah atau perilaku yang sangat merusak.

Ancaman radikalisme merupakan isu global yang semakin mengkhawatirkan, dan Indonesia pun tak luput dari dampaknya (Tawaang & Mudjiyanto, 2021). Lebih mengkhawatirkan lagi, kelompok rentan yang kini menjadi sasaran utama dalam generasi muda, khususnya pelajar. Akses mudah terhadap informasi, baik melalui media sosial maupun internet secara umum, seringkali dimanfaatkan oleh kelompok radikal untuk menyebarkan propaganda dan ideologi ekstrem. Kepolosan dan pembentukan karakter yang masih berlangsung pada usia pelajar menjadikan mereka sasaran empuk manipulasi dan indoktrinasi. Pengaruh lingkungan, baik dari pergaulan sebaya maupun lingkungan keluarga yang kurang harmonis, juga dapat memperparah situasi ini, membentuk pola pikir yang mudah terpengaruh oleh narasi-narasi kebencian dan intoleransi (Adi Saingo & Imanuel Nani, 2023).

Tindakan kekerasan bukanlah satu-satunya manifestasi radikalisme dalam pendidikan, kata-kata dan sikap yang dapat memicu kekerasan yang menyimpang dari norma-norma pendidikan yang berlaku juga dapat menjadi contoh. Setiap orang termasuk guru dan siswa, harus menghormati etika dan sopan santun. Perilaku negatif di lembaga pendidikan adalah akar penyebab ekstremisme. Salah satu hambatan terbesar bagi kemajuan suatu bangsa menuju peradaban yang lebih baik adalah menurunnya nasionalisme dan patriotisme di kalangan generasi mudanya (Cipta Prakasih et al., 2021). Erosi nasionalisme dan patriotisme ini telah membuat banyak anak muda menjadi bingung dan mementingkan diri sendiri. Namun, mengingat posisinya sebagai pilar pembangunan dan masa depan Negara Indonesia, generasi muda merupakan pemain penting dalam pergerakan nasional (Amtiran & Jondar, 2021).

Perkembangan radikalisme dengan menysasar generasi muda dalam konteks pendidikan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi bangsa Indonesia terkait dengan munculnya kelompok-kelompok radikal. Polarisasi situasi masyarakat Indonesia yang sangat beragam tidak dapat dilepaskan dari munculnya masalah radikalisme. Emosi anti-kebudayaan dan perspektif yang terbatas terhadap doktrin, teologi, dan ideologi tidak diragukan lagi merupakan hasil dari polarisasi. Beberapa kelompok individu gagal untuk memasukkan nilai-nilai nasionalisme berbasis kemajemukan yang merupakan akar dari radikalisme yang muncul di Indonesia. Menurut Suryani (di Indonesia, 2021) radikalisme sebagai sebuah ideologi sangat rentan mempengaruhi sikap generasi muda jika nilai-nilai yang dianutnya juga dimasukkan ke dalam atau diajarkan di sekolah.

Menurut Branson Civic Education yang juga dikenal sebagai pendidikan kewarganegaraan, berkontribusi pada pengembangan tiga kompetensi yang harus dimiliki oleh semua warga negara: pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan dan watak kewarganegaraan. Kompetensi-kompetensi ini dikenal sebagai pengetahuan kewarganegaraan (civics knowledge), keterampilan kewarganegaraan (civics skill), dan watak kewarganegaraan (civics dispositions).

Nilai-nilai Pancasila, yang merupakan esensi dan semangat bangsa Indonesia, adalah sumber nilai yang meresapi ketiga keterampilan tersebut. Seorang warga negara secara langsung atau tidak langsung akan menjadi orang yang cakap, berbakti, percaya diri, dan toleran jika ketiga kualitas ini

Santa Theresia Br Sipayung, Monalisa Marta Siahaan, Rince Mārpaung| Peran Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mencegah Radikalisme Non-Kekerasan Di Kalangan Pelajar Kelas VIII telah tertanam dalam jiwa dan kepribadiannya.

Penggunaan teknologi oleh siswa dapat dipengaruhi oleh peringatan tentang radikalisme di media daring, menurut Iffan et al (Naamy & Hariyanto, 2021) menyatakan bahwa di antara generasi milenial yang saat ini terdaftar di sekolah dan universitas, radikalisme menyebar dengan cepat. Pemerintah perlu melakukan sesuatu untuk mencegah para pelajar menjadi radikal. Radikalisme di kalangan pelajar membawa dampak signifikan bagi kehidupan sosial. Salah satunya adalah meningkatnya potensi konflik horizontal di masyarakat, berkurangnya rasa saling percaya di antara kelompok, serta ancaman terhadap kelangsungan kehidupan demokrasi. Pada level individu, pelajar yang terpapar paham radikal sering kali mengalami penyimpangan nilai-nilai moral, kehilangan hubungan sosial yang sehat, dan tidak mampu tumbuh secara maksimal sebagai agen perubahan di waktu yang akan datang. Sehingga, penelitian ini menjadi sangat krusial untuk mengkaji bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat dirancang dan diterapkan secara lebih efektif dalam mencegah radikalisme. Urgensi penelitian ini juga berkaitan dengan perlunya memperkuat daya tahan intelektual dan moral para pelajar agar mereka lebih siap menghadapi tantangan global yang semakin kompleks (S. N. Anggraini et al., 2022).

Penelitian ini secara khusus berfokus pada pencegahan radikalisme melalui pendidikan kewarganegaraan di kalangan pelajar, berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih berfokus pada pemberdayaan organisasi masyarakat sipil dan ancaman gerakan radikalisme di kalangan pemuda secara umum, seperti penelitian Ichwayudi (Putri, 2024) mengenai upaya dialog lintas agama dalam mengantisipasi ancaman gerakan radikalisme di kalangan pemuda.

Uraian di atas menunjukkan bagaimana nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti agama, kejujuran, kesopanan, persatuan, dan lain-lain telah hilang, terutama di kalangan pelajar. Kita semua sangat mementingkan prinsip-prinsip ini. Cara yang paling efektif untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam masyarakat Indonesia adalah melalui keluarga, masyarakat, dan sistem pendidikan (Abror, 2020). Salah satu inisiatif yang didukung oleh pemerintah adalah pengembangan sumber daya manusia Indonesia melalui mahasiswa Pancasila. Sebagai agen perubahan, institusi pendidikan sangat penting dalam membantu pemerintah dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan siswa. Dengan mengintegrasikan cita-cita ini ke dalam pengajaran di kelas, sekolah dapat menumbuhkan sikap Pancasila dan menjaga agar moral dan nilai tidak hilang pada generasi mendatang. Dengan demikian penulis menyusun proposal ini dengan judul “Peran Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mencegah Radikalisme Non-Kekerasan Di Kalangan Pelajar Kelas VIII SMP Swasta Katolik Mariana Medan”.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang suatu topik atau fenomena. Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan fokus pada penggambaran keadaan secara rinci dan mendalam. Dalam penelitian kualitatif, proses dan makna menjadi aspek utama yang diutamakan dibandingkan data numerik. Metode ini umumnya digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman, pandangan, atau situasi tertentu melalui teknik seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap konteks yang diteliti. Menurut Lathifaf (Arif, 2021) “Penelitian kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan dan perilaku subjek penelitian.”

Lokasi dan Waktu Penelitian

Info Artikel : Diterima April 2025 | Disetujui April 2025 | Dipublikasikan Mei 2025

Santa Theresia Br Sipayung, Monalisa Marta Siahaan, Rince Marpaung| Peran Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mencegah Radikalisme Non-Kekerasan Di Kalangan Pelajar Kelas VIII

Penelitian dilakukan di SMP Swasta Katolik Mariana Medan, yang berdomisili di Jl. Kapten Muslim No. 112, Medan. Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan Dwikora, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini berlangsung pada maret 2025 dengan metode pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses pengumpulan data dilakukan dalam beberapa sesi yang melibatkan kepala sekolah, guru PKn, dan siswa kelas VIII.

Subjek dan Informan Penelitian

Siswa kelas VIII SMP Swasta Katolik Mariana Medan merupakan subjek yang diteliti dalam penelitian ini. Kepala sekolah dan guru pada mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas VIII SMP Swasta Katolik Mariana Medan merupakan informan dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik-teknik berikut untuk mengumpulkan data terkait yang akan membantu keberhasilan penelitian ini:

1. Observasi

Proses pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap suatu hal atau peristiwa tanpa keterlibatan peneliti dikenal sebagai observasi. Dalam observasi, peneliti hanya berperan sebagai pengamat yang mencatat apa yang terjadi di lapangan. Observasi ini penting untuk memahami konteks sosial dan budaya di mana pendidikan kewarganegaraan berlangsung, sebagaimana diungkapkan oleh Setiawan (Khoiruddin, 2023) yang menekankan pentingnya konteks dalam pembelajaran. Observasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana pembelajaran berlangsung dan bagaimana siswa berinteraksi dengan materi Pancasila.

2. Wawancara

Wawancara adalah pendekatan pengumpulan data yang dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan responden untuk menggali informan yang lebih dalam. Daftar pertanyaan telah disiapkan sebelumnya dapat digunakan untuk melakukan wawancara secara terorganisir.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (Suprpto, 2020) yang menunjukkan bahwa wawancara dapat memberikan wawasan mendalam tentang sikap siswa terhadap keragaman dan toleransi. Guru dan siswa diwawancarai untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila digunakan dalam pembelajaran di kelas. Wawancara ini dimaksudkan untuk mendapatkan pendapat yang jujur (Gani PG et al., 2024).

Dalam metode wawancara ini, peneliti memfokuskan pada penggalian informasi yang mendalam terkait pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan siswa serta bagaimana guru mengintegrasikannya dalam pembelajaran.

3. Dokumentasi

Data historis yang tidak dapat diperoleh melalui cara lain dikumpulkan melalui dokumentasi. Metode ini memberikan informasi yang lebih objektif karena sudah tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Menurut (Agustino, 2022) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Teknik Analisis Data

Proses mengumpulkan informasi secara metodis dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi, mengorganisasikannya ke dalam pola, memilih informasi mana yang penting dan akan diperiksa, dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain dikenal sebagai analisis data (Permatasari & Junanto, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Dalam keseluruhan hasil penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari alat pengumpulan data yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam mencegah radikalisme non-kekerasan di kalangan siswa SMP Swasta Katolik Mariana Medan. Pengolahan data dilakukan secara sederhana karena penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pada bab sebelumnya, telah dijelaskan mengenai metodologi yang diterapkan dalam penelitian ini di SMP Swasta Katolik Mariana Medan.

Seluruh proses penelitian dilakukan secara langsung oleh peneliti, mulai dari wawancara hingga pengumpulan berbagai data dan informasi yang relevan. Selain itu, peneliti juga menerapkan beberapa langkah sistematis untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian (García-Alberti et al., 2021)

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam membentuk pemahaman siswa mengenai nilai-nilai kebangsaan dan toleransi. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan yang menekankan aspek kebhinekaan dan persatuan dapat menjadi strategi efektif dalam mengurangi potensi radikalisme non-kekerasan di lingkungan sekolah.

C. Pembahasan Penelitian

1. Peran Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Mencegah Radikalisme Non-Kekerasan di Kalangan Pelajar Kelas VIII SMP Swasta Katolik Mariana Medan

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mencegah siswa SMP Swasta Katolik Mariana Medan terpapar radikalisme non-kekerasan. Dalam konteks penelitian ini, radikalisme non-kekerasan merujuk pada sikap atau ucapan yang mengarah pada kebencian, intoleransi terhadap perbedaan, serta berperilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan norma sosial. Melalui mata pelajaran PKn, siswa dibimbing untuk memahami prinsip-prinsip dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti persatuan, toleransi dan keadilan sosial. Pembelajaran ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif, di mana siswa didorong untuk berdiskusi dan merefleksikan peran mereka dalam menjaga keharmonisan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Dengan cara ini siswa tidak hanya memahami pentingnya kebhinekaan tetapi juga memiliki kesadaran untuk menolak segala bentuk paham yang mengarah pada eksklusivisme dan fanatisme sempit.

Selain itu, mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis dalam menyaring informasi yang mereka terima, terutama dari media sosial dan lingkungan sekitar. Salah satu faktor yang mendorong penyebaran radikalisme non-kekerasan adalah penyebaran hoaks dan propaganda yang mengandung ujaran kebencian atau ajakan untuk bersikap intoleran terhadap kelompok lain. Dalam pembelajaran PKn, siswa dilatih untuk mengidentifikasi berita yang mengandung bias, memverifikasi kebenaran informasi, serta memahami dampak sosial dari penyebaran narasi yang bersifat diskriminatif. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai literasi digital dan kesadaran terhadap bahaya ujaran kebencian, siswa dapat lebih bijak dalam menanggapi informasi yang mereka temui serta tidak mudah terprovokasi oleh wacana yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan (Wagiono et al., 2021).

Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan juga berperan dalam membentuk karakter siswa agar lebih menghargai perbedaan dan mampu berinteraksi secara harmonis dengan teman-teman yang memiliki latar belakang budaya dan agama yang beragam. Sikap intoleransi sering kali muncul dari kurangnya pemahaman dan interaksi yang positif dengan kelompok lain. Oleh karena itu, dalam implementasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan strategi seperti simulasi debat dan diskusi kelompok dapat diterapkan untuk melatih siswa dalam menghadapi perbedaan secara sehat dan

konstruktif. Dengan cara ini, mereka tidak hanya diajarkan untuk menerima perbedaan tetapi juga memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila, seperti sila persatuan Indonesia dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain melalui pendekatan akademik, sekolah juga memperkuat peran mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam mencegah radikalisme non-kekerasan melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan budaya sekolah yang menekankan pentingnya nilai kebersamaan dan gotong royong. Dengan demikian, nilai-nilai yang diajarkan dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan tidak hanya sebatas teori di dalam kelas tetapi juga menjadi bagian dari pengalaman sosial yang membentuk karakter dan sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari (Aulia et al., 2021).

Dukungan dari berbagai pihak, termasuk guru, orang tua dan lingkungan sosial siswa, juga menjadi faktor krusial dalam memperkuat efektivitas PKn dalam mencegah radikalisme non-kekerasan. Guru PKn harus memiliki pendekatan yang inklusif dan dialogis dalam mengajar, sehingga siswa merasa nyaman untuk berdiskusi dan menyampaikan pandangan mereka mengenai isu-isu sosial yang relevan. Sementara itu orang tua diharapkan dapat melanjutkan nilai-nilai kebangsaan yang diajarkan di sekolah dengan menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan terbuka terhadap keberagaman. Dengan sinergi antara pendidikan formal di sekolah dan dukungan dari lingkungan keluarga serta masyarakat, upaya pencegahan radikalisme non-kekerasan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Pengamatan dan wawancara dilakukan secara sederhana dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada guru PPKn. Peneliti menggunakan pertanyaan tidak terstruktur agar tercipta suasana interaksi yang santai dan alami antara peneliti dan responden. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara lebih fleksibel tanpa terikat pada format pertanyaan yang kaku. Dengan demikian, peneliti dapat merangkum serta mendeskripsikan hasil wawancara secara jelas dan sistematis, menggunakan bahasa yang telah disusun dengan baik agar mudah dipahami.

Kesimpulan: Peneliti menyimpulkan bahwa mata pelajaran PPKn memiliki peran yang sangat penting dalam membangun karakter siswa melalui pemahaman dan penerapan aturan serta norma dalam kehidupan sehari-hari. Kepala sekolah menekankan bahwa ketaatan terhadap aturan merupakan langkah awal dalam membentuk karakter yang baik, karena dari kepatuhan tersebut, siswa dapat memahami batasan antara tindakan yang dapat diterima dan yang tidak sesuai dengan norma sosial serta nilai-nilai Pancasila.

Selain itu, peneliti juga menyimpulkan bahwa PPKn tidak hanya memberikan wawasan teoretis tentang hukum dan peraturan, tetapi juga memiliki dampak praktis dalam membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, dan kesadaran sosial siswa. Dengan memahami pentingnya aturan, siswa diharapkan tidak hanya menjadi individu yang taat hukum, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial (Syarifah, 2021).

Kesimpulan: Berdasarkan jawaban Ayustina, Delviana, dan Eleqma, peneliti menyimpulkan bahwa anak SMP memahami radikalisme sebagai cara berpikir atau bertindak yang berlebihan dan memaksakan kehendak. Mereka menyadari bahwa radikalisme sering kali melibatkan kekerasan dan kurangnya toleransi terhadap perbedaan pendapat. Selain itu, mereka juga menunjukkan pemahaman bahwa perubahan seharusnya dilakukan dengan cara yang damai dan bisa diterima oleh semua orang. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kesadaran tentang pentingnya sikap saling menghargai dan menolak tindakan yang merugikan orang lain.

2. Faktor yang memengaruhi tingkat kerentanan pelajar terhadap radikalisme

Radikalisme non-kekerasan di kalangan pelajar menjadi fenomena yang semakin perlu diperhatikan, terutama dalam era digital yang semakin kompleks. Meskipun tidak berbentuk tindakan fisik yang ekstrem, radikalisme jenis ini tetap berbahaya karena dapat mengubah pola pikir siswa menjadi intoleran, eksklusif, dan menolak keberagaman. Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat

kerentanan pelajar terhadap paham radikal sangat beragam, mulai dari lingkungan sosial hingga kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan. Tanpa adanya pencegahan yang tepat, pelajar dapat dengan mudah terpengaruh oleh ideologi yang bertentangan dengan prinsip Pancasila dan demokrasi (SW, 2020).

Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran penting dalam membangun kesadaran siswa terhadap bahaya radikalisme serta memperkuat pemahaman mereka tentang nilai-nilai persatuan dan toleransi. Namun, upaya pencegahan tidak hanya bergantung pada sekolah, melainkan juga pada lingkungan keluarga, media, dan kebijakan pendidikan yang mendukung pemikiran kritis di kalangan siswa. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang membuat pelajar lebih rentan terhadap radikalisme agar langkah-langkah preventif dapat dilakukan dengan efektif. Beberapa faktor utama yang berkontribusi terhadap tingkat kerentanan pelajar terhadap radikalisme antara lain sebagai berikut:

Kurangnya Pemahaman terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan

Salah satu faktor utama yang membuat pelajar rentan terhadap radikalisme adalah kurangnya pemahaman mereka terhadap nilai-nilai kebangsaan, khususnya Pancasila sebagai ideologi negara. Ketika pelajar tidak mendapatkan pemahaman yang kuat tentang konsep kebinekaan, toleransi, dan persatuan, mereka lebih mudah dipengaruhi oleh ideologi yang bersifat eksklusif dan menolak keberagaman. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mengatasi hal ini dengan memberikan wawasan mengenai pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman serta bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika siswa tidak memahami dasar-dasar kebangsaan dengan baik, maka mereka bisa saja mencari informasi dari sumber yang tidak kredibel, yang justru dapat menanamkan pemikiran yang bertentangan dengan semangat kebangsaan dan demokrasi (Naibaho et al., 2024).

Pengaruh Media Sosial dan Teknologi Informasi

Di era digital saat ini, media sosial menjadi salah satu faktor yang berperan besar dalam membentuk pola pikir dan perilaku pelajar. Radikalisme non-kekerasan sering kali menyebar melalui platform digital dalam bentuk propaganda, berita hoaks, atau narasi yang mengandung ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu. Pelajar yang kurang memiliki literasi digital dan tidak terbiasa berpikir kritis terhadap informasi yang mereka konsumsi menjadi lebih mudah terpengaruh oleh narasi yang bersifat provokatif. Oleh karena itu, pendidikan literasi digital menjadi aspek yang sangat penting dalam membekali siswa dengan kemampuan memilah dan menganalisis informasi secara objektif. Dengan pemahaman yang baik mengenai cara kerja media dan dampaknya terhadap opini publik, siswa dapat lebih waspada terhadap upaya manipulasi informasi yang dapat menanamkan sikap intoleran dan eksklusif (Zuriah, 2021).

Lingkungan Keluarga dan Sosial yang Kurang Mendukung

Faktor lain yang turut memengaruhi kerentanan pelajar terhadap radikalisme adalah lingkungan keluarga dan sosial. Pelajar yang tumbuh dalam lingkungan yang tertutup terhadap keberagaman atau memiliki pandangan eksklusif terhadap kelompok lain cenderung lebih mudah menerima paham yang mengarah pada radikalisme. Orang tua yang kurang terlibat dalam perkembangan pemikiran anak atau tidak memberikan wawasan yang seimbang mengenai nilai-nilai kebangsaan dapat membuat pelajar mencari referensi dari luar yang belum tentu sesuai dengan prinsip toleransi dan demokrasi. Selain itu, interaksi sosial di sekolah dan masyarakat juga berperan penting. Jika seorang siswa berada dalam kelompok pertemanan yang memiliki pandangan ekstrem atau mendapatkan pengaruh dari individu yang menyebarkan ideologi radikal, maka mereka bisa lebih mudah terpapar dan menerima pandangan tersebut tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya.

Faktor Psikologis

Masa remaja merupakan fase pencarian jati diri, di mana pelajar sering kali mencari makna dan tujuan dalam hidup mereka. Kondisi psikologis ini bisa menjadi celah bagi kelompok tertentu untuk menanamkan ideologi radikal dengan menawarkan identitas yang kuat dan tujuan hidup yang dianggap mulia. Pelajar yang merasa tidak dihargai, mengalami ketidakadilan, atau merasa kesepian lebih rentan untuk tertarik pada kelompok yang menawarkan solidaritas dan rasa memiliki. Oleh karena itu, penting bagi sekolah dan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap siswa merasa dihargai dan memiliki tempat dalam komunitasnya. Dengan demikian, mereka tidak perlu mencari validasi atau pemenuhan kebutuhan emosional dari kelompok-kelompok yang dapat membawa mereka ke arah pemikiran radikal (Prastitasari, 2021).

Kurangnya Ruang Diskusi dan Pemikiran Kritis di Sekolah

Sekolah memiliki peran besar dalam membentuk pola pikir dan sikap siswa terhadap berbagai isu sosial dan kebangsaan. Namun, jika lingkungan sekolah kurang memberikan ruang untuk diskusi terbuka dan pemikiran kritis, siswa dapat lebih mudah menerima informasi secara mentah tanpa mempertanyakan kebenaran atau dampaknya. Metode pembelajaran yang terlalu berfokus pada hafalan tanpa mengembangkan kemampuan analisis dapat membuat siswa kurang siap menghadapi berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan harus didesain untuk mendorong siswa berpikir kritis, berdebat secara sehat, serta memahami berbagai sudut pandang sebelum mengambil kesimpulan. Dengan demikian, mereka akan lebih sulit dipengaruhi oleh paham radikal karena sudah terbiasa untuk menguji informasi sebelum menerimanya sebagai kebenaran.

Kesimpulan: Peneliti menyimpulkan bahwa tantangan dalam mengajarkan nilai-nilai toleransi dan kebinekaan kepada siswa cukup kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Tantangan utama berasal dari perbedaan latar belakang siswa, pengaruh media sosial yang sulit dikendalikan, kurangnya keterlibatan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan, serta metode pembelajaran yang kurang interaktif.

Peneliti juga mencatat bahwa pendidikan toleransi tidak bisa hanya bergantung pada sekolah atau guru semata, tetapi memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk keluarga dan masyarakat. Selain itu, diperlukan strategi pembelajaran yang lebih inovatif dan kontekstual agar siswa tidak hanya memahami konsep toleransi secara teori, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, peneliti menegaskan bahwa pendidikan toleransi dan kebinekaan harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pendekatan yang lebih interaktif dan berbasis pengalaman. Jika tantangan-tantangan ini dapat diatasi dengan baik, maka nilai-nilai kebangsaan yang berbasis Pancasila dapat tertanam lebih kuat dalam diri siswa, sehingga mereka menjadi individu yang lebih terbuka, kritis, dan memiliki kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan dalam keberagaman.

Kesimpulan: Dari jawaban Ayustina, Delviana, dan Eleqma, dapat disimpulkan bahwa anak SMP memiliki kesadaran terhadap tanda-tanda sikap yang berpotensi radikal di lingkungan mereka. Mereka mengenali sikap seperti merasa paling benar, menolak pendapat orang lain, serta menjauhi atau menyalahkan kelompok tertentu sebagai hal yang tidak baik.

Respon mereka terhadap situasi ini menunjukkan adanya pemahaman tentang pentingnya komunikasi dan toleransi. Mereka cenderung memilih cara yang damai, seperti mengajak diskusi dan memberi pemahaman, tetapi juga tahu kapan harus menjaga jarak jika seseorang tetap bersikap keras kepala. Hal ini menunjukkan bahwa anak SMP sudah memiliki sikap kritis terhadap pemikiran yang terlalu berlebihan dan memahami pentingnya sikap saling menghargai dalam pergaulan.

Berdasarkan temuan penelitian, terlihat bahwa pelajar memiliki tingkat kesadaran yang cukup baik dalam mengenali sikap yang berpotensi radikal di lingkungan mereka. Namun, kesadaran ini belum cukup kuat untuk sepenuhnya mencegah penyebaran paham radikal di kalangan mereka. Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar pendekatan edukatif yang lebih interaktif diterapkan, salah

Santa Theresia Br Sipayung, Monalisa Marta Siahaan, Rince Marpaung| Peran Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mencegah Radikalisme Non-Kekerasan Di Kalangan Pelajar Kelas VIII satunya melalui pembuatan poster. Poster dapat menjadi media yang efektif dalam menyampaikan pesan toleransi, keberagaman, dan pentingnya berpikir kritis. Dengan desain visual yang menarik dan pesan yang mudah dipahami, poster mampu menarik perhatian siswa serta menjadi pengingat bagi mereka agar selalu bersikap terbuka terhadap perbedaan (Rachman & Fitra, 2020a).

Pembuatan poster dapat dilakukan sebagai bagian dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, di mana siswa tidak hanya menerima teori tentang nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga terlibat aktif dalam menyampaikan pesan tersebut kepada teman-teman mereka. Dalam proses pembelajaran, guru dapat mengajak siswa untuk berdiskusi terlebih dahulu mengenai berbagai faktor yang membuat seseorang rentan terhadap radikalisme, seperti kurangnya pemahaman terhadap Pancasila, pengaruh media sosial, serta lingkungan sosial yang eksklusif. Setelah memahami faktor-faktor tersebut, siswa diminta untuk merancang poster yang berisi ajakan positif untuk menjaga sikap toleran, berpikir kritis terhadap informasi yang diterima, serta menghargai perbedaan di lingkungan mereka (Alifah et al., 2021).

Selain sebagai bentuk edukasi, pembuatan poster juga menjadi cara untuk membangun kesadaran kolektif di sekolah. Poster yang telah dibuat oleh siswa dapat dipajang di berbagai sudut sekolah, seperti di kelas, koridor, dan papan pengumuman, agar pesan yang terkandung di dalamnya dapat terus dilihat dan diingat oleh semua siswa. Dengan begitu, tidak hanya siswa yang terlibat dalam proses pembuatan poster yang mendapat manfaat, tetapi juga seluruh komunitas sekolah. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan kondusif bagi penguatan nilai-nilai kebangsaan. Jika poster dibuat dengan kreatif dan melibatkan elemen-elemen visual yang relevan dengan kehidupan pelajar, maka pesan yang disampaikan akan lebih mudah diterima dan dipahami oleh mereka (Adha et al., 2021).

Pembuatan poster juga dapat dikombinasikan dengan kegiatan lain yang mendukung pemikiran kritis dan toleransi, seperti diskusi kelompok dan presentasi. Siswa dapat diminta untuk menjelaskan makna dari poster yang mereka buat dan bagaimana poster tersebut dapat membantu mencegah penyebaran paham radikal. Melalui presentasi ini, mereka belajar untuk menyampaikan pendapat dengan baik serta berdiskusi secara sehat dengan teman-temannya. Kegiatan ini juga melatih mereka dalam mengolah informasi, memahami berbagai perspektif, dan membangun sikap empati terhadap orang lain. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan tidak hanya sekadar teori di dalam kelas, tetapi juga diimplementasikan dalam kehidupan nyata secara kreatif dan menarik.

Pembuatan poster menjadi salah satu strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap bahaya radikalisme serta pentingnya sikap toleransi dan berpikir kritis. Poster dapat menjadi media komunikasi yang efektif dalam menyampaikan nilai-nilai kebangsaan kepada siswa dengan cara yang sederhana namun berdampak besar. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong siswa untuk lebih aktif dalam memahami dan menyebarkan pesan positif di lingkungan sekolah. Dengan penerapan yang berkelanjutan dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan sekolah dapat menjadi tempat yang aman dan inklusif bagi seluruh siswa dalam memahami serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

3. Strategi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila guna mencegah radikalisme

Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn) memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan sikap kebangsaan siswa, terutama dalam menghadapi ancaman radikalisme non-kekerasan. Pembelajaran yang efektif harus mampu menanamkan nilai-nilai Pancasila secara mendalam agar siswa memiliki pemahaman yang kuat tentang toleransi, persatuan, dan kebinekaan. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai strategi pembelajaran dapat diterapkan guna memastikan bahwa nilai-nilai

Santa Theresia Br Sipayung, Monalisa Marta Siahaan, Rince Marpaung| Peran Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mencegah Radikalisme Non-Kekerasan Di Kalangan Pelajar Kelas VIII tersebut tertanam dalam kesadaran dan praktik kehidupan sehari-hari siswa. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran PPKn untuk mencegah radikalisme:

Pendekatan Kontekstual dalam Pembelajaran

Pendekatan kontekstual merupakan strategi yang menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi kehidupan nyata yang dihadapi siswa. Dalam pembelajaran PPKn, guru dapat menyajikan materi tentang Pancasila dengan mengaitkannya pada fenomena sosial yang terjadi di lingkungan sekitar. Misalnya, siswa dapat diajak untuk menganalisis isu-isu terkait intoleransi, ujaran kebencian, atau konflik sosial yang sedang berkembang. Dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar teori tentang nilai-nilai Pancasila, tetapi juga memahami bagaimana penerapan nilai-nilai tersebut dapat mencegah radikalisme dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini juga membantu siswa mengaitkan pelajaran dengan pengalaman pribadi mereka, sehingga lebih mudah dipahami dan diinternalisasi dalam sikap dan tindakan mereka (Kanetaki et al., 2021).

Selain itu, pendekatan kontekstual dapat dilakukan dengan menggunakan metode tanya jawab dan refleksi atas pengalaman yang mereka alami di lingkungan sekolah maupun keluarga. Misalnya, guru dapat meminta siswa untuk mengamati bagaimana perbedaan pendapat di sekitarnya diselesaikan secara demokratis atau bagaimana sikap toleransi diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat (Sihombing & Lukitoyo, 2021). Dengan berdiskusi tentang pengalaman tersebut, siswa akan lebih memahami bahwa nilai-nilai Pancasila bukan hanya teori yang diajarkan di kelas, tetapi juga menjadi prinsip yang harus diterapkan dalam interaksi sosial sehari-hari. Pemahaman ini akan membantu siswa lebih sadar akan bahaya sikap eksklusif dan intoleran yang menjadi pintu masuk bagi paham radikal.

Metode Diskusi

Metode diskusi merupakan strategi yang dapat mengembangkan pemikiran kritis siswa dalam memahami isu-isu yang berkaitan dengan radikalisme dan intoleransi. Dalam metode ini, siswa diajak untuk membahas dan menganalisis berbagai kasus nyata yang terjadi di masyarakat, baik di tingkat lokal maupun global. Misalnya, guru dapat menyajikan kasus tentang konflik berbasis agama atau etnis, lalu meminta siswa untuk mengidentifikasi penyebabnya dan mencari solusi berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar secara pasif, tetapi juga aktif berpikir dan menemukan solusi yang mencerminkan sikap toleransi dan kebinekaan.

Selain itu, diskusi kelompok memungkinkan siswa untuk bertukar pendapat dan memahami perspektif yang berbeda dari teman-teman mereka. Hal ini penting dalam membentuk pola pikir yang lebih terbuka dan inklusif terhadap keberagaman. Guru juga dapat memberikan skenario hipotetis, seperti bagaimana seharusnya seseorang bersikap jika menghadapi kelompok yang memiliki pandangan berbeda. Dengan berlatih menganalisis dan mendiskusikan berbagai situasi, siswa akan lebih siap menghadapi narasi-narasi radikal yang sering kali disajikan dalam bentuk propaganda. Melalui diskusi yang konstruktif, mereka akan lebih memahami bahwa Pancasila adalah dasar negara yang mengakomodasi keberagaman dan menjaga persatuan.

Pembelajaran Berbasis Pengalaman dan Refleksi

Metode pembelajaran berbasis pengalaman dan refleksi menekankan pada keterlibatan langsung siswa dalam memahami nilai-nilai Pancasila. Guru dapat mengajak siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, seperti bakti sosial, kerja sama lintas agama, atau kunjungan ke komunitas yang beragam. Dengan mengalami interaksi langsung dengan berbagai kelompok masyarakat, siswa akan merasakan sendiri pentingnya sikap toleransi dan saling menghormati. Pengalaman ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam daripada sekadar membaca buku atau mendengar ceramah di kelas.

Setelah mengikuti kegiatan sosial, siswa diminta untuk merefleksikan pengalaman mereka dan menuliskan kesimpulan mengenai nilai-nilai yang mereka pelajari. Mereka dapat berbagi cerita tentang bagaimana mereka merasakan perbedaan budaya atau agama dalam interaksi sosial dan

Santa Theresia Br Sipayung, Monalisa Marta Siahaan, Rince Marpaung| Peran Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mencegah Radikalisme Non-Kekerasan Di Kalangan Pelajar Kelas VIII
bagaimana nilai-nilai Pancasila membantu mereka memahami serta menghormati perbedaan tersebut. Dengan melakukan refleksi, siswa akan lebih mudah menginternalisasi nilai-nilai yang telah mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, metode ini juga mendorong siswa untuk lebih aktif dalam membangun sikap positif di lingkungan sekolah dan masyarakat sebagai upaya nyata dalam mencegah radikalisme (Abidin et al., 2015).

Penggunaan Media Digital dan Literasi Informasi

Di era digital, siswa sangat mudah mengakses berbagai informasi dari internet dan media sosial. Namun, tidak semua informasi yang mereka terima berasal dari sumber yang kredibel. Oleh karena itu, salah satu strategi penting dalam pembelajaran PPKn adalah membekali siswa dengan keterampilan literasi digital agar mereka dapat memilah informasi yang benar dan menghindari narasi yang mengarah pada radikalisme. Guru dapat mengajarkan teknik verifikasi informasi, cara mengenali berita hoaks, serta bagaimana menghadapi propaganda yang beredar di dunia maya. Dengan memiliki kemampuan ini, siswa akan lebih kritis dalam menerima informasi dan tidak mudah terpengaruh oleh ideologi radikal yang sering menyebar melalui media sosial.

Selain itu, pemanfaatan media digital juga dapat digunakan untuk menyampaikan materi Pancasila dengan cara yang lebih menarik. Guru dapat menggunakan video edukatif, podcast, atau simulasi interaktif yang membahas tentang pentingnya toleransi dan persatuan. Dengan pendekatan yang lebih modern dan sesuai dengan karakteristik generasi digital, siswa akan lebih mudah memahami dan tertarik untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan mereka. Dengan strategi ini, pendidikan PPKn tidak hanya sekadar mengajarkan teori, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan nyata dalam menghadapi tantangan zaman.

Pembelajaran PPKn dalam rangka menanamkan nilai-nilai Pancasila guna mencegah radikalisme harus dilakukan secara sistematis dan inovatif. Strategi yang digunakan harus mampu membuat siswa memahami bahwa Pancasila bukan sekadar konsep, tetapi juga prinsip hidup yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan kontekstual, diskusi dan studi kasus, pembelajaran berbasis pengalaman, serta literasi digital merupakan beberapa metode yang dapat digunakan untuk membangun kesadaran siswa terhadap pentingnya toleransi dan persatuan.

Keberhasilan strategi ini tidak hanya bergantung pada guru, tetapi juga pada lingkungan sekolah dan dukungan dari orang tua. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara semua pihak agar siswa tidak hanya mendapatkan pemahaman yang benar tentang nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam interaksi sosial mereka. Dengan pendidikan yang tepat, diharapkan generasi muda dapat menjadi agen perdamaian yang menjaga keberagaman dan mencegah berkembangnya paham radikalisme di tengah masyarakat (Faigy & Arsana, 2014).

Kesimpulan: Dari jawaban Ayustina, Delviana, dan Eleqma, dapat disimpulkan bahwa siswa SMP sudah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai peran nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menyadari bahwa Pancasila bukan sekadar teori yang harus dihafalkan, tetapi juga harus diterapkan dalam interaksi sosial mereka.

Para siswa memahami bahwa nilai-nilai Pancasila, seperti toleransi beragama (sila pertama), persatuan dalam keberagaman (sila ketiga), serta musyawarah dan keadilan sosial (sila keempat dan kelima), memiliki peran penting dalam menjaga hubungan yang harmonis di lingkungan sekolah dan masyarakat. Mereka juga menunjukkan sikap kritis dengan memberikan contoh konkret dari pengalaman mereka, seperti bagaimana musyawarah bisa menyelesaikan masalah dan bagaimana sikap saling menghargai dapat memperkuat persatuan.

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan Pancasila telah memberikan pengaruh positif dalam membentuk karakter mereka. Namun, untuk memperkuat pemahaman ini, diperlukan pendekatan pembelajaran yang lebih aplikatif dan kontekstual, sehingga siswa semakin mampu menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan mereka.

Peneliti menyikapi temuan ini dengan melihat bahwa meskipun pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila sudah cukup baik, masih ada tantangan dalam mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten. Jawaban siswa menunjukkan bahwa mereka menyadari pentingnya toleransi, persatuan, dan musyawarah dalam menyelesaikan konflik. Namun, peneliti menilai bahwa pemahaman ini masih bersifat konseptual dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam bentuk sikap yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembelajaran yang lebih aplikatif, di mana siswa dapat mengalami langsung bagaimana nilai-nilai Pancasila berfungsi dalam kehidupan sosial mereka (Rachman & Fitra, 2020b).

Peneliti juga menyadari bahwa metode yang diterapkan oleh guru saat ini, seperti pendekatan kontekstual dan diskusi kelompok, sudah cukup efektif dalam menanamkan pemahaman awal mengenai nilai-nilai kebangsaan. Namun, agar pembelajaran lebih berdampak, perlu ada peningkatan dalam bentuk pembelajaran berbasis pengalaman. Misalnya, siswa dapat dilibatkan dalam proyek sosial yang mendorong mereka untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila secara nyata, seperti kegiatan gotong royong, advokasi sosial, atau kampanye toleransi di media sosial. Dengan pengalaman langsung, mereka tidak hanya memahami konsep, tetapi juga merasakan dampak positif dari penerapan nilai-nilai tersebut (Buka, 2022).

Peneliti menyoroti peran lingkungan dalam memperkuat atau melemahkan pemahaman siswa terhadap Pancasila. Jika di sekolah mereka diajarkan untuk menghargai perbedaan, tetapi dalam lingkungan sosial atau keluarga mereka justru menghadapi contoh intoleransi, maka kemungkinan besar mereka akan mengalami kebingungan nilai (Maatuk et al., 2022). Oleh karena itu, peneliti menyarankan agar pendekatan pembelajaran tidak hanya berfokus pada siswa, tetapi juga melibatkan orang tua dan masyarakat. Misalnya, sekolah dapat mengadakan program yang melibatkan orang tua dalam diskusi nilai-nilai Pancasila atau membangun kerja sama dengan komunitas lokal untuk menciptakan lingkungan sosial yang mendukung sikap kebinekaan (Massie & Nababan, 2021).

Selain itu, peneliti menyoroti pentingnya literasi digital dalam membentengi siswa dari pengaruh radikalisme yang tersebar luas di media sosial. Jawaban siswa menunjukkan bahwa mereka memahami pentingnya musyawarah dan keadilan sosial, tetapi di era digital ini, banyak narasi ekstrem yang menggiring opini dengan sudut pandang yang bias dan provokatif. Oleh karena itu, peneliti menilai bahwa penguatan literasi informasi harus menjadi bagian dari strategi pembelajaran PPKn. Guru perlu membekali siswa dengan keterampilan berpikir kritis dalam memilah informasi, mengenali hoaks, serta memahami bagaimana propaganda radikal dapat memengaruhi cara berpikir seseorang (R. Anggraini & Wibawa, 2019).

Secara keseluruhan, peneliti menyimpulkan bahwa meskipun pemahaman siswa terhadap nilai-nilai Pancasila sudah cukup baik, langkah selanjutnya adalah memperkuat aspek aplikatif dan pengalaman nyata dalam pembelajaran. Dengan melibatkan siswa dalam aktivitas sosial yang relevan, membangun lingkungan yang mendukung penerapan nilai-nilai Pancasila, serta memperkuat kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan digital, pendidikan PPKn dapat menjadi lebih efektif dalam membentuk karakter kebangsaan yang kuat (Rahmad et al., 2024). Hal ini tidak hanya bertujuan untuk membangun generasi yang paham Pancasila, tetapi juga memastikan mereka memiliki daya tahan terhadap paham-paham radikal yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa pencegahan radikalisme dalam pendidikan, khususnya melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), memiliki peran yang sangat penting. Radikalisme merupakan ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa karena dapat menanamkan pemahaman yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, pendidikan menjadi sarana strategis dalam membangun pemahaman yang moderat dan inklusif di kalangan siswa. Dalam

penelitian ini ditemukan bahwa salah satu pendekatan efektif dalam pencegahan radikalisme adalah dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam materi pembelajaran. Dengan demikian, siswa dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar kebangsaan, seperti toleransi, gotong royong, dan menghormati perbedaan, dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, peningkatan literasi digital juga menjadi faktor penting dalam mencegah masuknya paham radikal di kalangan generasi muda. Di era digital saat ini, banyak informasi yang beredar dengan cepat melalui media sosial dan internet. Jika tidak memiliki pemahaman yang baik dalam memilah informasi, siswa dapat dengan mudah terpengaruh oleh propaganda dan berita hoaks yang mengandung unsur radikalisme. Oleh karena itu, sekolah dan guru PPKn harus berperan aktif dalam memberikan edukasi kepada siswa tentang cara mengenali informasi yang valid serta menanamkan sikap kritis terhadap konten yang mereka konsumsi di dunia maya. Dengan membekali siswa dengan literasi digital yang baik, mereka akan lebih mampu menyaring informasi serta menghindari ajakan atau propaganda yang bersifat ekstrem.

Peran guru PPKn dalam mencegah radikalisme juga sangat signifikan dalam membentuk pola pikir siswa yang lebih moderat dan terbuka. Guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam memahami konsep kebangsaan secara lebih mendalam. Metode pembelajaran yang interaktif, seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi peran, dapat membantu siswa untuk lebih memahami isu-isu sosial yang berkaitan dengan radikalisme dan bagaimana cara menghadapinya. Dengan demikian, pendidikan PPKn dapat menjadi benteng dalam menanamkan sikap nasionalisme dan kebangsaan yang kuat pada generasi muda agar tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham yang bertentangan dengan nilai Pancasila.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas pencegahan radikalisme dalam dunia pendidikan. Pertama, pemerintah dan instansi pendidikan perlu lebih menekankan integrasi nilai-nilai kebangsaan dalam kurikulum sekolah. Mata pelajaran PPKn harus lebih menyoroti bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya toleransi dan persatuan dalam masyarakat yang majemuk. Selain itu, perlu adanya pelatihan bagi para pendidik agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik dalam menghadapi isu radikalisme dan dapat mengajarkannya dengan cara yang lebih efektif kepada siswa.

Kedua, sekolah diharapkan dapat meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler yang mendukung pembentukan karakter kebangsaan. Kegiatan seperti diskusi kebangsaan, seminar tentang toleransi, serta program pertukaran budaya dapat membantu siswa untuk lebih memahami dan menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Selain itu, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran juga perlu ditingkatkan untuk membantu siswa lebih kritis dalam menyaring informasi yang mereka peroleh dari internet. Dengan adanya edukasi mengenai literasi digital, diharapkan siswa dapat lebih bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi yang mengandung unsur radikalisme.

Ketiga, peran keluarga juga menjadi faktor yang sangat penting dalam membentuk karakter dan pola pikir anak. Oleh karena itu, orang tua perlu lebih aktif dalam mendampingi anak dalam mengakses informasi dan memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga persatuan bangsa. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat diperlukan agar upaya pencegahan radikalisme dapat berjalan secara lebih optimal. Dengan kerja sama yang baik antara berbagai pihak, diharapkan generasi muda Indonesia dapat tumbuh dengan pemahaman kebangsaan yang kuat serta memiliki sikap yang toleran dan inklusif dalam kehidupan bermasyarakat.

REFERENCESS

- Abidin, R. F., Pitoewas, B., & Adha, M. M. (2015). *Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengembangkan Kecerdasan Moral Siswa*. Lampung University.
- Abror, M. (2020). Moderasi Beragama Dalam Bingkai Toleransi. *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam*, 1(2), 137–148. <https://doi.org/10.35961/Rsd.V1i2.174>
- Adha, M. M., Parikesit, H., Perdana, D. R., Hartino, A. T., & Ulpa, E. P. (2021). *Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Pkn Di Masa Pandemi Covid-19 Demi Masyarakat Taat Psbb*. <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/27544>
- Adi Saingo, Y., & Imanuel Nani, V. (2023). Pengaruh Religiusitas Dan Kemajuan Teknologi Informasi Terhadap Penangkalan Radikalisme Di Perguruan Tinggi Berbasis Agama Di Kota Kupang. *Jurnal Reinha*, 14(1), 35–47. <https://doi.org/10.56358/Ejr.V14i1.222>
- Agustino, A. (2022). Penerapan Nilai–Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Guna Membangun Sikap Sosial Dan Tanggung Jawab Siswa/I Di Kelas Pada Kelas Ix. B Di Smp Negeri 1 Merawang Tahun Pelajaran 2019/2020. *Jee (Jurnal Edukasi Ekobis)*, 9(2).
- Alifah, M., Adha, M. M., Perdana, D. R., Hartino, A. T., & Rifai, A. (2021). *Upaya Meningkatkan Karakter Disiplin Peserta Didik Pada Pembelajaran Daring Di Masa Pandemi Covid-19*. <http://repository.lppm.unila.ac.id/id/eprint/27545>
- Amtiran, A. A., & Jondar, A. (2021). Kebijakan Anti Radikalisme Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Pancasila Dan Solusinya. *Praja Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (E-Issn: 2797-0469)*, 1(2), 57–75.
- Anggraini, R., & Wibawa, S. (2019). Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Penerapan Etika Dan Moral Peserta Didik Dalam Lingkungan Formal Di Smk Negeri 1 Stabat Tahun Pelajaran 2018/2019. *Jurnal Serunai Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(2), 151–157. <https://doi.org/10.37755/Jspk.V8i2.195>
- Anggraini, S. N., Rahman, A., Martono, T., Kurniawan, A. R., & Febriyani, A. N. (2022). Strategi Pendidikan Multikulturalisme Dalam Merespon Paham Radikalisme. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 2(01), 30–39. <https://doi.org/10.57008/Jjp.V2i01.93>
- Arif, K. M. (2021). Concept And Implementation Of Religious Moderation In Indonesia. *Al-Risalah*, 12(1), 90–106. <https://doi.org/10.34005/Alrisalah.V12i1.1212>
- Aulia, P., Nugraha, D. M., & . S. (2021). Urgensi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Disiplin Belajar Siswa Dalam Situasi Pandemi Covid-19. *Harmony: Jurnal Pembelajaran Ips Dan Pkn*, 6(1), 48–56. <https://doi.org/10.15294/Harmony.V6i1.46646>
- Buka, F. (2022). Peran Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Mengimplementasikan Nilai–Nilai Sosial Selama Masa Pembelajaran Daring. *Mindset: Jurnal Pemikiran Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(3). <https://doi.org/10.56393/Mindset.V2i3.936>
- Cipta Prakasih, R., Firman, F., & Rusdinal, R. (2021). Nilai Nasionalisme Dan Anti Radikalisme Dalam Pendidikan Multikultural. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 2(02), 294–303. <https://doi.org/10.59141/Japendi.V2i02.103>
- Di Indonesia, L. P. R. (2021). Upaya Lembaga Pendidikan Islam Dalam Menangkal Radikalisme Murni. *Literasi Paham Radikalisme Di Indonesia*, 147.
- Faidy, A. B., & Arsana, I. M. (2014). Hubungan Pemberian Reward Dan Punishment Dengan Motivasi Belajar Pendidikan Kewarganegaraan Siswa Kelas Xi. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 2(2), 454–468.
- Gani Pg, E., Thani, S., Muksalmina, M., Chyntia, E., & Sulaiman, S. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Digital Etik Dalam Penggunaan Sosmed Di Kalangan Remaja Pada Siswa/I Sma Swasta

- Santa Theresia Br Sipayung, Monalisa Marta Siahaan, Rince Mårpaung| Peran Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mencegah Radikalisme Non-Kekerasan Di Kalangan Pelajar Kelas VIII Iskandar Muda Aceh Utara. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 5(2), 2837–2846. <https://doi.org/10.55338/Jpkmn.V5i2.3416>
- García-Alberti, M., Suárez, F., Chiyón, I., & Mosquera Feijoo, J. C. (2021). Challenges And Experiences Of Online Evaluation In Courses Of Civil Engineering During The Lockdown Learning Due To The Covid-19 Pandemic. *Education Sciences*, 11(2), 59. <https://doi.org/10.3390/Educsci11020059>
- Kanetaki, Z., Stergiou, C., Bekas, G., Troussas, C., & Sgouropoulou, C. (2021). Analysis Of Engineering Student Data In Online Higher Education During The Covid-19 Pandemic. *Int. J. Eng. Pedagogy Ijep*, 11, 27–49.
- Khoiruddin, K. (2023). Moderasi Beragama Dalam Kearifan Lokal Pada Masyarakat Pesisir Barat Provinsi Lampung. *Moderatio: Jurnal Moderasi Beragama*, 3(1), 76. <https://doi.org/10.32332/Moderatio.V3i1.5865>
- Maatuk, A. M., Elberkawi, E. K., Aljawarneh, S., Rashaideh, H., & Alharbi, H. (2022). The Covid-19 Pandemic And E-Learning: Challenges And Opportunities From The Perspective Of Students And Instructors. *Journal Of Computing In Higher Education*, 34(1), 21–38. <https://doi.org/10.1007/S12528-021-09274-2>
- Massie, A. Y., & Nababan, K. R. (2021). Dampak Pembelajaran Daring Terhadap Pendidikan Karakter Siswa. *Satya Widya*, 37(1), 54–61. <https://doi.org/10.24246/J.Sw.2021.V37.11.P54-61>
- Naamy, N., & Hariyanto, I. (2021). Moderasi Beragama Di Ruang Publik Dalam Bayang-Bayang Radikalisme. *Sophist: Jurnal Sosial Politik Kajian Islam Dan Tafsir*, 3(2), 41–59. <https://doi.org/10.20414/Sophist.V3i2.51>
- Naibaho, L., Nainggolan, J. A., Hutapea, N. M., Tobing, S. L., Bangun, D. Y. B., & Rachman, F. (2024). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Menanggulangi Disinformasi Dan Hoaks Di Era Media Sosial Pada Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 Perspektif Siswa/I Sma Swasta Eria Medan. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (Jrpp)*, 7(4), 15269–15277. <https://doi.org/10.31004/Jrpp.V7i4.36224>
- Permatasari, A. I., & Junanto, S. (2023). Mplementasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Karakter Siswa Kelas V Menggunakan Pendekatan Kontekstual Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Sukoharjo Tahun Ajaran 2022/2023. *Diss. Uin Surakarta*.
- Prastitasari, H. (2021). *Pembelajaran Pendidikan Karakter Di Sd Melalui Pembelajaran Pjj Pada Masa Pandemi Covid-19*. <https://repo-dosen.ulm.ac.id/handle/123456789/20053>
- Putra, D. A., & Rulloh, A. (2023). Model Kepemimpinan Strategis Dalam Menghadapi Radikalisme Dan Terorisme. *Maras: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(3), 508–519.
- Putri, D. (2024). Ektremisme Agama Dan Radikalisme Sebagai Pendorong Terorisme. *Al-Ikhtiar: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 114–127. <https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/aljsi/article/view/62>
- Rachman, F., & Fitra, I. (2020a). Kewarganegaraan Dan Kesehatan: Partisipasi Warga Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 289–303. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/Um019v5i2p289-303>
- Rachman, F., & Fitra, I. (2020b). Kewarganegaraan Dan Kesehatan: Partisipasi Warga Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 5(2), 289. <https://doi.org/10.17977/Um019v5i2p289-303>
- Rahmad, N., Setiawan, D., & Dewi, M. A. S. (2024). Penyuluhan Hukum Tentang Pemahaman Siswa Terhadap Bullying Dalam Perspektif Hukum Di Smk Muhammadiyah Sempor. *Jurnal Warta Desa (Jwd)*, 6(2), 96–103. <https://doi.org/10.29303/Jwd.V6i2.301>
- Sihombing, R. A., & Lukitoyo, P. S. (2021). Peranan Penting Pancasila Dan Pendidikan

- Santa Theresia Br Sipayung, Monalisa Marta Siahaan, Rince Marpaung| Peran Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mencegah Radikalisme Non-Kekerasan Di Kalangan Pelajar Kelas VIII Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Karakter Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 49–59. <https://doi.org/10.23887/jpku.v9i1.31426>
- Suprpto, S. (2020). Integrasi Moderasi Beragama Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. *Edukasi: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 18(3), 355–368. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v18i3.750>
- Sw, Y. (2020). Problematika Pembelajaran Sejarah Daring Dan Solusinya Di Masapandemi Covid 19 Dalam Perspektif Pendidikan Karakter Bagi Siswa Kelas X Di Sma Veteran 1 Sukoharjo Tahunpembelajaran2020-2021. *Civics Education And Social Science Journal (Cessj)*, 2(2). <https://doi.org/10.32585/Cessj.v2i2.1142>
- Syarifah, Y. (2021). Implementasi Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Menggunakan Goole Classroom Untuk Meningkatkan Respon Terhadap Peserta Siswa Apada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Smks Sore Tulungagung). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(2), 203–212. <https://doi.org/10.31571/pkn.v5i2.3089>
- Tawaang, F., & Mudjiyanto, B. (2021). Mencegah Radikalisme Melalui Media Sosial. *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 2(2). <https://doi.org/10.24815/jimps.v8i4.27068>
- Wagiono, F., Shaddiq, S., & Junaidi, F. (2021). Implementation Of Blended Learning During Covid-19 Pandemic On Civic Education Subjects In Millenial Generation Era. *Edunesia : Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 3(1), 36–44. <https://doi.org/10.51276/edu.v3i1.213>
- Zuriah, N. (2021). Penanaman Nilai-Nilai Karakter Pancasila Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Polysynchronous Di Era New Normal. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 6(1), 12–25. <https://doi.org/10.21067/jmk.v6i1.5086>